

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KOMPETENSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT, TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA KECAMATAN WANADADI

Anisa Septiana¹; Rina Mudjiyanti²; Eko Hariyanto³; Nur Isna Inayati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia^{1,2,3,4}

Email : annisaseptianaa09@gmail.com¹; rinamudjiyanti@ump.ac.id²;
ekoh0361@gmail.com³; nurisna.inayati@gmail.com⁴;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanadadi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif bersifat explanatory dan desain cross-sectional. Data diperoleh melalui kuesioner yang disusun berdasarkan konstruk reflektif dan diadaptasi dari penelitian terdahulu. Sampel berjumlah 84 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert dan analisis data dilakukan menggunakan PLS-SEM melalui SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan transparansi dan kompetensi aparatur tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Nilai R-square sebesar 0,349 mengindikasikan bahwa model hanya mampu menjelaskan 34,9% variasi efektivitas pengelolaan Dana Desa, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan pertanggungjawaban publik dan pelibatan masyarakat sebagai strategi penguatan tata kelola Dana Desa. Adapun variabel transparansi dan kompetensi aparatur perlu memperoleh dukungan fasilitas serta peningkatan kapasitas teknis agar pengaruhnya terhadap pengelolaan Dana Desa dapat lebih optimal.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Efektivitas Pengelolaan Dana Desa; Kompetensi Aparatur; Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of accountability, transparency, public servant competency, and community participation on the effectiveness of Village Fund management in Wanadadi District. The study uses a quantitative method with an associative approach that is explanatory and a cross-sectional design. Data were obtained through questionnaires compiled based on reflective constructs and adapted from previous research. The sample amounted to 84 respondents who were selected using the purposive sampling technique, while data collection was carried out through a Likert scale questionnaire and data analysis was carried out using PLS-SEM through SmartPLS 3. The results of the study show that accountability and community participation have a positive and significant effect on the effectiveness of Village Fund management, while transparency and public servant competency do not show a significant influence. The R-square value of 0.349 indicates that the model is only able to explain 34.9% of the variation in the effectiveness of Village Fund management, while the rest is influenced by other variables outside the study. These findings affirm the importance of increasing public accountability and community involvement as a strategy to strengthen the governance of the Village Fund. The variables of transparency and public servant competency need to obtain facility support and technical capacity building so that its influence on the management of Village Funds can be more optimal.

Keywords : Accountability; Effectiveness of Village Fund Management; Community Participation; Public Servant Competency; Transparency

PENDAHULUAN

Sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan di wilayah perdesaan, Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Regulasi ini mengatur bahwa Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa. Kebijakan tersebut menegaskan dorongan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola desa yang mandiri, profesional, dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring implementasi otonomi daerah, akuntansi sektor publik berperan penting dalam memperkuat tata kelola, sehingga pengelolaan Dana Desa dituntut memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama agar Dana Desa dapat digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Permendagri Nomor. 15, 2024). Lebih jauh, Dana Desa dialokasikan untuk berbagai program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan peran strategisnya, kajian mengenai pengelolaan Dana Desa penting dilakukan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan menyediakan bukti empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih baik (Hilmawan, 2023).

Penelitian (Hariyanto, 2020), menegaskan pentingnya pengawasan sebagai unsur utama dalam menjaga akuntabilitas. Hal ini relevan dalam konteks pengelolaan Dana Desa yang membutuhkan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan transparansi proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Mekanisme pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab utama, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas kebijakan, Camat sebagai pembina, serta Dinpermades sebagai pihak yang melakukan evaluasi sesuai regulasi (Permendagri No. 2, 2025). Struktur tersebut, transparansi menjadi unsur kunci yang memperkuat efektivitas pengawasan. Keterbukaan informasi dapat mendorong pengawasan partisipatif dan meningkatkan kepercayaan publik, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala seperti terbatasnya fasilitas teknologi informasi dan rendahnya literasi digital aparatur desa.

Menurut (Amalia, 2023), akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan pengelolaan dana yang berada dalam kewenangannya. Sementara itu, (Rizal, 2024) menekankan bahwa akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban administratif dan moral agar masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara objektif. Di sisi lain, kompetensi aparatur desa juga sangat menentukan efektivitas pengelolaan Dana Desa, meliputi pemahaman teknis, penguasaan regulasi, dan kemampuan

mengelola program pembangunan secara komprehensif (Artika, 2023). Selain itu, partisipasi masyarakat berperan sebagai elemen kunci dalam memastikan bahwa program serta kegiatan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan lokal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Ayuandani, 2022). Oleh karena itu, integrasi antara akuntabilitas aparatur, kemampuan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk mendukung efektivitas pengelolaan dana serta mendorong terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024–2025, Kecamatan Wanadadi memperoleh alokasi Dana Desa yang kemudian dibagikan kepada 11 desa, namun penelitian ini hanya memfokuskan pada 8 desa. Total dana yang diterima Kecamatan Wanadadi mencapai Rp 9.894.700.000, dengan rincian penyaluran per desa tercantum pada Lampiran Tabel 1. Penyaluran Dana Desa tersebut mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 (PMK Nomor 108, 2025), yang menetapkan bahwa alokasi dihitung berdasarkan total penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, serta karakteristik geografis masing-masing desa, sekaligus menentukan arah prioritas penggunaan anggarannya. Prioritas tersebut mencakup program penanggulangan kemiskinan ekstrem, termasuk alokasi maksimal 15% untuk BLT Desa, Upaya membangun desa yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim, memperbaiki layanan kesehatan dasar dan menekan risiko stunting, memperkuat sistem pangan, mengoptimalkan potensi lokal, serta mempercepat penerapan teknologi digital di tingkat desa, pelaksanaan pembangunan melalui skema padat karya tunai, serta sektor prioritas lainnya. Selain itu, (Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun, 2025), menerapkan kebijakan tata kelola Dana Desa yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk memastikan penggunaan dana berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanadadi masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Beberapa permasalahan yang muncul meliputi ketidaksamaan tingkat pertanggungjawaban aparatur, keterbatasan dalam akses serta penggunaan teknologi informasi, dan perbedaan kemampuan perangkat desa yang mayoritas berpendidikan tingkat menengah. Selain itu, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan belum berlangsung secara konsisten, sehingga memengaruhi mutu pengawasan serta efektivitas program yang dijalankan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana akuntabilitas, keterbukaan informasi, kompetensi aparatur, dan peran serta masyarakat memengaruhi efektivitas, baik secara terpisah ataupun secara simultan. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian tersebut diarahkan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel serta menentukan faktor yang paling berperan dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Wanadadi.

Urgensi penelitian semakin diperkuat oleh temuan berbagai temuan terdahulu yang menunjukkan inkonsistensi hasil terkait pengaruh variabel-variabel tersebut. Sejumlah penelitian menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan (Shagita, 2024), sedangkan penelitian lain menyatakan tidak berpengaruh (Anggreni Putri, 2021). Dalam aspek transparansi, (Artika, 2023), menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh, namun (Rizal, 2024) menunjukkan hasil sebaliknya. Demikian pula penelitian terhadap kompetensi aparatur menghasilkan temuan berbeda, di mana (Nasrizal, 2024) menyatakan berpengaruh, tetapi (Juniarti, 2022), menyatakan tidak berpengaruh. Perbedaan serupa juga terjadi dalam variabel partisipasi masyarakat, dengan (Maina, 2022) menyatakan tidak berpengaruh, sementara (Indra Hermawan, 2021) menemukan pengaruh signifikan. Ketidakselarasan hasil penelitian ini menunjukkan perlunya kajian lebih spesifik pada konteks Kecamatan Wanadadi untuk memberikan gambaran empiris yang relevan bagi perbaikan tata kelola Dana Desa.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agency

Menjelaskan bahwa principal memberikan mandat kepada agent untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan dengan harapan hasil kinerja yang optimal (Donaldson, 1991). Dalam pengelolaan Dana Desa, masyarakat berperan sebagai *principal* yang memiliki kepentingan terhadap penggunaan dana publik, sementara aparatur desa bertindak sebagai *agent* yang diberi wewenang untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut. Mekanisme ini berfungsi untuk mengurangi peluang penyimpangan serta memastikan pengelolaan dana berjalan efektif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas ialah aspek penting dalam memastikan bahwa tujuan atau target yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi, program, atau kegiatan dapat tercapai. Suatu aktivitas dinilai efektif apabila mampu memenuhi sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Konsep efektivitas juga digunakan untuk menilai arah dan kinerja organisasi sehingga dapat diketahui apakah diperlukan perubahan dalam proses pengelolaan maupun operasionalnya (Ayuandani, 2022). Pada konteks pengelolaan Dana Desa, efektivitas mencerminkan tingkat keberhasilan desa dalam melaksanakan program dan aktivitas yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa sehingga tujuan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Akuntabilitas

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa setiap keputusan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas mencerminkan pertanggungjawaban atas pengelolaan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada tingkat desa, akuntabilitas menjadi

kewajiban pemerintah desa untuk melaporkan seluruh aktivitas kepada pemberi dana serta masyarakat (Habriyanto, 2024). Sejalan dengan (Putri Zhafira, 2022) yang menekankan akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang berwenang untuk mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan, prinsip tanggung jawab tersebut penting dalam pengelolaan Dana Desa. (Rizal, 2024) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban publik mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang memastikan masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan hingga hasil yang dicapai, sehingga menjadi bentuk komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat (Puspitasari, 2023). Sejalan dengan (Rahma Yulita, 2023), menyatakan bahwa transparansi memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui proses pelaksanaan pemerintahan dan membantu pemerintah menjalankan amanah dari rakyat. Hal tersebut diperkuat oleh (Widya Nengsih, 2019), yang menegaskan bahwa transparansi menuntut penyediaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa yang benar dan mudah diakses, meskipun pada praktiknya masih belum merata. Padahal, transparansi merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik dan penilaian kinerja pemerintah.

Kompetensi Aparatur

Menurut (Diatmika, 2020), kompetensi perangkat desa memiliki peran penting terhadap peningkatan penyerapan dana desa dan memastikan penyalurannya sesuai dengan rencana. Kompetensi yang mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian yang tercermin dari kemampuan aparatur dalam menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan dana desa. (Juniarti, 2022), menambahkan bahwa kompetensi aparatur merupakan kemampuan atau keahlian aparatur pemerintah desa dalam mengatur pemanfaatan dana desa, yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Menurut (Widiyadari, 2023), menyatakan bahwa kemampuan menjalankan pelaksanaan tugas yang ditunjang oleh wawasan, kecakapan, dan karakter kerja yang memadai mencerminkan kualitas kerja aparatur, termasuk dalam pengelolaan, sehingga kapasitas aparatur menjadi aspek krusial bagi keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan melalui pemikiran, tenaga, maupun dukungan lain dalam mendorong perkembangan desa (Anita Firdaus, 2019). Keterlibatan ini penting dalam pengelolaan keuangan desa karena membantu aparatur desa menyampaikan informasi serta memahami kondisi dan keperluan masyarakat (Wulandari, 2024). Selain itu, partisipasi aktif warga dalam evaluasi dan pengawasan turut mencegah penyalahgunaan

wewenang serta memberi masukan dalam penyusunan kebijakan anggaran agar lebih efektif (Darma Putra, 2019).

Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Penelitian yang dilakukan oleh (Rizal, 2024), (Rahma Yulita, 2023) dan (Wulandari, 2024), menegaskan bahwa pertanggungjawaban aparatur berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa. Pertanggungjawaban dipandang sebagai suatu kewajiban staf desa untuk menyampaikan laporan atas kinerja dan tindakan yang mereka lakukan kepada pihak yang berwenang, memastikan pelaporan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sehingga pelaksanaan pemerintahan dapat dinilai dan diawasi secara terbuka. Ketika akuntabilitas diterapkan dengan baik, tata kelola Dana Desa menjadi lebih transparan, terukur, dan dapat diawasi secara efektif, sehingga mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan dana. Penjelasan diatas, hipotesis penelitian yang diajukan sebagai berikut:

H1 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Transparansi berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Transparansi merupakan prinsip upaya pemerintah dalam membuka akses informasi yang tepat, dapat dipercaya, dan mudah dijangkau oleh masyarakat, sehingga mampu memperkuat tingkat kepercayaan publik (Riyanto, 2021). Penelitian (Nasrizal, 2024), (Nislandi, 2023) dan (Shagita, 2024), mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi berdampak pada proses pengelolaan Dana Desa. Pada level pemerintahan desa, transparansi meliputi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan, pelaporan kegiatan, serta publikasi informasi secara jelas. Keterbukaan ini mengurangi ketimpangan informasi antar pemerintah desa dan masyarakat, yang pada akhirnya berpotensi memperbaiki efektivitas pengelolaan Dana Desa. Rumusan hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi Aparatur berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Ni Putu, 2020), (Ridha Fajri, 2021) dan (Megaayu, 2023) membuktikan bahwa kompetensi aparatur memiliki positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Efektivitas pengelolaan Dana Desa sangat ditentukan oleh tingkat kompetensi aparatur dalam mengatur dan memanfaatkan dana yang diterima dari diberikan oleh APBD. Kompetensi aparatur mencakup kapasitas dan keahlian dalam mengelola pemerintahan serta keuangan desa, yang meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, wawasan luas, keahlian teknis, serta sikap kerja. Aparatur yang kompeten mampu

merencanakan, melaksanakan dan memepertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa secara tepat sasaran. Berdasarkan uraian diatas hipotesis penelitian adalah:

H3 : Kompetensi Aparatur berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa

Partisipasi Masyarakat berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Keterlibatan masyarakat merujuk pada peran aktif warga pada keseluruhan rangkaian tata kelola dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan (Indra Hermawan, 2021). Penelitian (Wulandari, 2024), (Anggreni Putri, 2021) dan (Gema Syahriady, 2023), membuktikan bahwa variabel tersebut berdampak positif pada efektivitas pengelolaan dana desa. Tingkat partisipasi yang tinggi dapat menumbuhkan rasa memiliki, memperkuat peran pengawasan, serta menjamin bahwa pemanfaatan dana desa selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, partisipasi warga menjadi unsur yang berperan besar dalam mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Dugaan semesntara penelitian adalah :

H4 : Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif yang bersifat explanatory casual untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Pendekatan survei cross-sectional digunakan karena penelitian tidak hanya menguji hubungan antar konstruk, tetapi juga menjelaskan pengaruh langsung yang terjadi dalam satu periode waktu. Secara konseptual, model penelitian terdiri dari 4 variabel: Akuntabilitas (X_1), Transparansi (X_2), Kompetensi Aparatur (X_3), dan Partisipasi Masyarakat (X_4), yang diasumsikan memengaruhi variabel dependen (Y) Efektivitas Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini dilaksanakan pada delapan dari sebelas desa di Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan tiga desa lainnya tidak berpartisipasi karena tidak memberikan persetujuan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan representativitas lokasi apabila desa yang tidak berpartisipasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa yang menjadi sampel. Namun demikian, keseragaman kondisi sosial, struktural, dan administratif antar desa di Kecamatan Wanadadi secara umum dinilai dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya keterbatasan tersebut. Penelitian dilaksanakan pada periode April - Juni 2025 dengan populasi yang terdiri atas perangkat desa dan ketua RT yang terlibat dalam pengelolaan maupun pengawasan Dana Desa. Dari total 88 individu pada delapan

desa tersebut, sebanyak 84 responden memenuhi kriteria penelitian dan dinyatakan layak untuk dianalisis.

Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling (Sugiyono, 2019), berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perangkat desa yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) antara lain kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala seksi pelayanan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan desa, serta ketua RT. Selain itu, responden harus telah bekerja minimal satu tahun sehingga dianggap memahami proses pengelolaan Dana Desa, serta bersedia mengisi kuesioner secara sukarela.

Operasional variabel dalam penelitian ini disusun berdasarkan indikator yang diadaptasi dari penelitian terdahulu yang telah teruji validitasnya. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 5 poin, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju. Indikator variabel sebagai berikut; Akuntabilitas (X_1) indikator menurut, (Rizal, 2024); Penyusunan Anggaran Pemerintah Desa, Perumusan rencana kerja oleh pemerintah Desa, Pengajuan Anggaran, Pelaksanaan Belanja Desa, Jumlah Belanja, Evaluasi Kinerja, Laporan Keuangan. Transparansi (X_2) indikator menurut, (Novia Rosy, 2022): Dilaksanakannya musyawarah bersama masyarakat setempat, Tersedianya penerimaan data yang jelas dan keterbukaan terkait peraturan serta pelaksanaan kegiatan. Kompetensi aparatur (X_3) indikator menurut, (Budiarti, 2021); Pengetahuan, Keterampilan, Keahlian, Sikap. Partisipasi masyarakat (X_4) indikator menurut, (Budiarti, 2021); Keikutsertaan dalam penyusunan, Keikutsertaan dalam penyusunan, Proses perencanaan serta implementasi, Keterlibatan Masyarakat dalam proses evaluasi. Efektivitas pengelolaan Dana Desa (Y) indikator menurut, (Rizal, 2024); Tujuan Desa, Waktu Kegiatan, Manfaat Kegiatan, Pengelolaan Dana Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada perangkat desa pada delapan desa sampel. Dari 88 kuesioner yang dibagikan, sebanyak 84 kembali lengkap dan layak dianalisis. Pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri dalam waktu rata-rata 15–20 menit, dan lembar kuesioner dikembalikan dalam kurun waktu sekitar satu minggu, meskipun beberapa desa memerlukan waktu lebih lama. Seluruh proses pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika penelitian, di mana responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian., peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta jawaban responden, dan seluruh data digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Selain itu, penelitian ini telah memperoleh izin resmi dari Baperlitbang, Bakesbangpol, dan pihak Kecamatan Wanadadi.

Pada ukuran sampel sebanyak 84 responden dinilai memadai untuk dianalisis menggunakan pendekatan Partial Least Square–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Berdasarkan Minimum R-square Approach (Hair, 2021), nilai R-square pada variabel efektivitas pengelolaan Dana Desa sebesar 0,349 telah memenuhi persyaratan untuk mendeteksi hubungan struktural pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, jumlah indikator sebanyak 32 item menghasilkan rasio indikator terhadap sampel sebesar 2,6, yang sesuai dengan standar kecukupan sampel dalam PLS-SEM.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS dengan spesifikasi konstruk reflektif. Untuk mengantisipasi potensi *Common Method Bias* (CMB), instrumen yang digunakan diadaptasi dari penelitian terdahulu yang telah teruji validitasnya, item disusun secara acak untuk mengurangi pola jawaban, dan pengisian dilaksanakan secara mandiri oleh responden. Secara eks-post (prosedur pengujian) dilakukan pula *Harman's Single Factor Test*, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat satu faktor tunggal yang mendominasi varians, sehingga CMB tidak dianggap mengganggu kualitas data. Analisis model PLS-SEM dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Outer Model dan Inner Model; pada Outer Model dinilai validitas konvergen (loading factor > 0,70; AVE > 0,50), reliabilitas konstruk (Composite Reliability dan Cronbach's Alpha > 0,70), sedangkan pada Inner Model dievaluasi R-square, Q-square, f-square, dan signifikansi jalur melalui prosedur bootstrapping dengan 5.000 subsampel dan pengujian satu arah (one-tailed). Pemilihan metode PLS-SEM dan SmartPLS didasarkan pada kemampuannya mengolah sampel relatif kecil dan kecocokannya untuk model kompleks (Ghozali, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis Deskriptif Responden

Berdasarkan lampiran tabel 2, karakteristik responden, penelitian ini melibatkan 84 aparatur desa dengan komposisi yang beragam. Dari aspek usia, mayoritas responden termasuk dalam kelompok usia >40 tahun, yaitu mencapai 60 orang 71,43%. Proporsi ini mengindikasikan bahwa mayoritas aparatur desa berada pada fase usia kerja matang, yang umumnya berkaitan dengan pengalaman kerja yang lebih panjang. Sementara itu, 19 responden 22,62% berada pada rentang usia 31-39 tahun dan hanya 5 responden 5,95% yang berusia 21-30 tahun. Berdasarkan kategori jenis kelamin, jumlah responden laki-laki tercatat sebanyak 54 orang 64,29%, sedangkan responden perempuan berjumlah 30 orang 35,71%.

Komposisi ini mencerminkan bahwa struktur aparatur desa dalam konteks penelitian masih cenderung maskulin. Pada aspek pendidikan, sebagian besar responden lulusan SMA/SMK sebanyak 45 orang 53,57% berpendidikan S1 dan hanya 1 responden 1,19% berpendidikan S2, sedangkan 5 responden 5,95% memiliki latar belakang pendidikan lainnya.

Distribusi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan aparatur desa relatif beragam, meskipun dominasi lulusan SMA menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kompetensi melalui pelatihan teknis maupun pendidikan lanjutan.

Berdasarkan dari aspek jabatan, sebagian besar responden berada pada kategori “jabatan lainnya” sebanyak 60 orang (71,43%). Kategori ini mencakup perangkat desa dengan tugas fungsional maupun teknis, seperti Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Urusan Perencanaan, serta perangkat pendukung lainnya. Sementara itu, responden yang menduduki jabatan struktural inti, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kaur Keuangan, masing-masing berjumlah 8 orang (9,52%). Distribusi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berasal dari jajaran aparatur yang menjalankan fungsi operasional di desa, bukan jabatan pimpinan struktural.

Outer Model

Uji *Convergent Validity*

Menurut hasil pengujian pada lampiran tabel 3. Setiap pernyataan pada masing-masing variabel telah memenuhi kriteria *convergent validity*. Hal tersebut ditunjukkan oleh tidak ditemukannya indikator dengan nilai loading factor di bawah 0,70. Oleh sebab itu, setiap indikator dianggap menggambarkan konstruk dengan tepat dan sesuai untuk dimasukkan ke dalam model penelitian.

Uji Statistics Deskriptif

Berdasarkan lampiran pada tabel 4, hasil analisis deskriptif terhadap 84 responden, seluruh variabel penelitian mengindikasikan kategori penilaian berada pada tingkat baik hingga tinggi, yang mencerminkan kondisi tata kelola Dana Desa di Kecamatan Wanadadi secara umum tergolong positif. Variabel akuntabilitas aparatur desa dengan nilai mean 35,63 serta deviasi standar 3,673, aparatur dinilai telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara efektif. Dengan deviasi standar 1,735 dan nilai rata-rata 18,05, variabel transparansi menunjukkan transparansi informasi yang stabil dalam prosedur pengelolaan Dana Desa.

Dengan nilai rata-rata 26,68 dan deviasi standar 2,662, variabel kompetensi aparatur desa juga berada dalam kategori baik, meskipun terdapat perbedaan pendapat responden mengenai kemampuan teknis aparatur. Di sisi lain, nilai rata-rata keterlibatan masyarakat adalah 30,65, dengan deviasi standar 3,374, yaitu menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat yang relatif tinggi namun tidak merata. Adapun efektivitas pengelolaan Dana Desa dinilai baik secara umum, dengan persepsi responden yang cenderung stabil. Temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan keterlibatan masyarakat dan peningkatan kemampuan perbaikan untuk memaksimalkan keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Uji *Composite Reliability*

Berdasarkan lampiran pada tabel 5. Jika skor *Composite Reliability* dan ukuran *Cronbach's Alpha* dari suatu konstruk melebihi 0,70, maka model dianggap reliabel. Seluruh variabel pada penelitian ini telah memenuhi standar tersebut, sebagaimana terlihat dari hasil uji reliabilitas pada masing-masing konstruk. Instrumen yang digunakan juga menunjukkan konsistensi internal yang kuat serta layak dipercaya untuk mengukur variabel penelitian secara stabil dan akurat, yang ditunjukkan melalui pencapaian nilai reliabilitas pada setiap konstruk yang melampaui 0,70. Semua konstruk dalam penelitian ini terbukti memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas berdasarkan hasil uji *Composite Reliability* pada tabel 5. Tingkat konsistensi yang tinggi pada seluruh variabel juga menegaskan kecukupan kualitas instrumen penelitian. Di samping itu, skor Average Variance Extracted (AVE) pada tiap konstruk tercatat lebih dari 0,50, sehingga dapat dinyatakan bahwa setiap konstruk dalam penelitian ini telah mencapai standar validitas konvergen dan layak digunakan untuk tahap analisis berikutnya.

Model Struktural (*Inner Model*)

Path Model

Pada lampiran gambar 2. menunjukkan model struktural (path model) hasil analisis menggunakan SmartPLS 3.0. Model ini menggambarkan hubungan antarvariabel laten, yaitu akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, keterlibatan aktif warga, serta efektivitas pengelolaan Dana Desa. Koefisien jalur menunjukkan nilai sebesar 0,434 untuk akuntabilitas, 0,103 untuk transparansi, 0,006 untuk kompetensi aparatur, dan 0,254 untuk partisipasi masyarakat. Nilai R-Square sebesar 0,349 mengindikasikan bahwa keempat variabel independen mampu menjelaskan 34,9% variasi efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan sisanya 65,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara umum, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan, sementara keterbukaan informasi dan kompetensi aparatur belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Hubungan antarvariabel tersebut dapat digambarkan dengan bentuk persamaan struktural berikut:

$$Y = 0,434X_1 + 0,103X_2 + 0,006X_3 + 0,254X_4 + e$$

Keterangan :

- Y= Efektivitas Pengelolaan Dana Desa
- X₁= Akuntabilitas
- X₂=Transparansi
- X₃= Kompetensi Aparatur
- X₄=Partisipasi Masyarakat
- e =Error atau variabel lain di luar model

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan peningkatan pertanggungjawaban dan keterlibatan masyarakat, akan mendorong meningkatnya efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Sebaliknya, keterbukaan informasi serta kompetensi aparatur belum memberikan pengaruh yang berarti dalam meningkatkan efektivitas tersebut.

Uji *Coefficient of Determination* (R^2)

Berdasarkan lampiran tabel 6. Pada variabel Efektivitas Pengelolaan Dana Desa tercatat memperoleh 0,349 serta nilai yang disesuaikan yaitu 0,316. Hal ini menunjukkan bahwa 34,9% varians dalam efektivitas pengelolaan Dana Desa dapat menjelaskan secara bersamaan oleh variabel independen akuntabilitas, transparansi, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model studi berpengaruh terhadap 65,1% sisanya, seperti kondisi sosial-ekonomi masyarakat, pengawasan internal, kualitas kepemimpinan desa, serta kebijakan pemerintah daerah yang tidak dianalisis dalam studi ini. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun keempat variabel tersebut berkontribusi yang cukup signifikan, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk mengeksplorasi faktor tambahan yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan Dana Desa secara lebih komprehensif.

Uji *Predictive Relevance* (Q^2)

Berdasarkan lampiran pada tabel 7. Konsep Efektivitas Pengelolaan Dana Desa mendapatkan Q-Square 0,198 dalam uji relevansi prediktif (Q^2). Mengingat nilai tersebut memenuhi persyaratan $Q^2 > 0$, model dapat dinilai memiliki kemampuan prediksi yang memadai. Dengan demikian, model yang digunakan dianggap layak dari sisi prediktif dan mampu menggambarkan fenomena penelitian dengan baik. Selain menunjukkan bahwa faktor-faktor independen dalam penelitian ini berkontribusi terhadap prediksi efektivitas pengelolaan Dana Desa, kesimpulan ini mendukung validitas model.

Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 8, nilai t-tabel pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$) dengan $df = 80$ yaitu 1,664. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan SmartPLS melalui prosedur bootstrapping untuk memperoleh estimasi hubungan antar variabel, termasuk nilai p-value dan t-statistic. Hasil t-hitung yang diperoleh dari analisis tersebut dievaluasi dengan membandingkan terhadap t-tabel (1,664) untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis. Seluruh hasil pengujian, meliputi nilai sampel asli, t-statistic, dan p-value, disajikan lengkap pada tabel 8 sebagai dasar pengambilan keputusan statistik.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh bahwa akuntabilitas (X_1) memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, dengan nilai original sample sebesar 0,434, t-statistic $4,671 > 1,664$, serta p-value $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban aparatur desa dalam menjalankan tugasnya, semakin meningkat pula efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan

dengan temuan (Setyaningrum, 2024), (Rizal, 2024), dan (hindrayani, 2021), yang menyimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas mampu memperkuat efektivitas pengelolaan Dana Desa. Sehingga, akuntabilitas menjadi faktor utama untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan dapat dipercaya.

Dalam perspektif agency teory, masyarakat berperan sebagai principal, sedangkan aparatur desa bertindak sebagai agent, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian untuk memastikan agen bertindak sesuai kepentingan principal. Akuntabilitas berperan mengurangi *agency problem* dengan menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban setiap penggunaan Dana Desa. Sehingga temuan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan agen menjalankan tugas secara transparan dan sesuai tujuan principal.

Pengaruh Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan data yang diolah memperlihatkan bahwa, keterbukaan publik (X2) belum memberikan pengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, dengan nilai sampel asli 0,103, *t-statistic* $0,908 < t \text{ tabel } 1,664$, dan *p-value* $0,139 > 0,05$. Mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi yang dilakukan staf desa belum mampu meningkatkan efektivitas secara langsung. Faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan sarana teknologi informasi, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta transparansi yang belum disertai penyajian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan (Puspitasari, 2023), (Maina, 2022) dan (Artika, 2023), yang menegaskan bahwa transparansi tidak berdampak signifikan apabila tidak dibarengi mekanisme pengawasan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Dalam perspektif agency theory, transparansi menjadi mekanisme penting untuk mengurangi *agency problem* dengan memperkecil kesenjangan informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan aparatur desa sebagai *agent*. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi saja belum memadai tanpa adanya integritas, konsistensi, dan komitmen aparatur desa dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, transparansi perlu didukung oleh kapasitas masyarakat dan komitmen agen agar dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis data, ditemukan kemampuan aparatur desa tidak memberikan dampak berarti terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistic* $0,066 < 1,664$ dan *p-value* $0,474 > 0,05$. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi aparatur relatif seragam, di mana sebagian besar berpendidikan SMA (53,57%), sehingga variasi kemampuan yang ada belum cukup kuat untuk menimbulkan pengaruh yang berbeda. Mengacu

pada Human Capital Theory (Collin and Clark, 2013), kompetensi hanya memberikan dampak apabila kualitas dan perbedaan tingkat kemampuan aparatur memadai. Pada penelitian ini, kesamaan pengetahuan dan keterampilan menyebabkan kompetensi tidak mampu menjadi penentu perbedaan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan (Juniarti, 2022), (Lestari, 2023), tetapi berbeda dengan (Megaayu, 2023) yang menemukan bahwa kemampuan aparatur berpengaruh positif terhadap pengelolaan Dana Desa. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa di Kecamatan Wanadadi, peran pertanggungjawaban aparatur serta keterlibatan warga desa lebih berperan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dibandingkan aspek kompetensi teknis.

Teori agency, yang menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya publik tidak hanya bertumpu pada kemampuan teknis, tetapi juga pada integritas, rasa tanggung jawab, dan orientasi kolektif aparatur desa sebagai pengelola amanah masyarakat. Oleh karena itu, meskipun kemampuan teknis aparatur belum sepenuhnya optimal, komitmen dan rasa tanggung jawab yang tinggi tetap menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi masyarakat (X4) terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, ditunjukkan nilai *t-statistic* $2,727 > 1,664$ serta *p-value* $0,006 < 0,05$. Artinya, semakin besar keterlibatan warga pada proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, semakin optimal pula efektivitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Indra Hermawan, 2021), (Artika, 2023) dan (Putri, 2022), yang megaskan bahwa partisipasi masyarakat mampu meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pengawasan publik.

Dalam perspektif teori agency, masyarakat berperan sebagai *principal* yang mengawasi aparatur desa sebagai *agent*. Partisipasi masyarakat yang kuat mampu mengurangi potensi informasi asimetris, meminimalkan peluang penyimpangan, serta menekan terjadinya moral hazard dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan meningkatnya kontrol dari masyarakat, aparatur desa terdorong untuk bekerja lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kepentingan publik. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat menjadi mekanisme pengawasan penting dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan efektif

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa akuntabilitas serta keterlibatan warga berkontribusi secara positif bermakna terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa, sedangkan transparansi dan kompetensi aparatur belum menunjukkan pengaruh signifikan. Secara simultan,

keempat variabel hanya mampu menjelaskan 34,9% variasi efektivitas pengelolaan Dana Desa, sehingga masih terdapat unsur lain di luar penelitian yang memengaruhi pengelolaannya.

Temuan pada penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah desa perlu memperkuat akuntabilitas melalui peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan, serta terus mendorong keterlibatan masyarakat karena terbukti paling mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa. Transparansi perlu diperkuat melalui penyediaan sarana teknologi informasi dan peningkatan literasi digital aparatur agar informasi publik dapat diakses dan dimanfaatkan dengan lebih baik, sementara peningkatan kompetensi aparatur tetap penting meskipun tidak berpengaruh signifikan pada penelitian ini.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan wilayah karena hanya melibatkan delapan desa, serta mengandalkan instrumen self-report yang berpotensi dipengaruhi persepsi subjektif responden. Selain itu, desain cross-sectional tidak memungkinkan peneliti mengamati perubahan tata kelola dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan cakupan desa yang lebih luas, menggunakan pendekatan mixed-method, serta mempertimbangkan variabel lain, misalnya kepemimpinan, pengendalian internal, atau pemanfaatan teknologi informasi, memperluas wilayah penelitian, menggunakan metode campuran seperti wawancara atau observasi, serta mengukur kompetensi aparatur secara lebih objektif agar menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. M. (2023). *Enhancing Accountability and Transparency in the Public Sector: A Comprehensive Review of Public Sector Accounting Practices*. 1(03), 160–168. <https://doi.org/10.58812/esaf.v1.i03>
- Angreni Putri. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Anita Firdaus. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 1–10., 291–300.
- Artika. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.32332/finansia.v6i2.7650>
- Ayuandani. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 299–307. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.21045>
- Budiarti. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Leminggir Kecamatan Mojosari. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*10.5 (2021)., 2460–0585.
- Collin and Clark. (2013). *Konsep Human Capital*.
- Darma Putra. (2019). Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli (2019): 132-158*, 28(2302–8556), 132–158.

- Diatmika. (2020). Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Buleleng. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.1 No.4. 2020: 215-223, 1(4), 215–223.*
- Gema Syahriady. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Humaniora, Vol.7 , No.2, Oktober 2023 : 230-239. Http://Jurnal.Abulyatama.Ac.Id/Humaniora, 7(2), 230–239.*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.*
- Habriyanto. (2024). Analisis Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Meningkatkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Marga Mulia Kecamatan Rantau Rasau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen Vol.2, No.7 Juli 2024, 2(7), 688–700.*
- Hair, J. F. (2021). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). *European Journal of Tourism Research, 6(2), 211–213.*
- Hariyanto, E. (2020). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi (JEBA), 22(4), 429–437.*
- Hilmawan. (2023). Journal of Open Innovation : Technology , Market , and Complexity Rural development from village funds , village-owned enterprises , and village original income. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 9(4), 100159. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159*
- hindrayani. (2021). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Kintamani, Bangli). *Jurnal Hindu Indonesia E-ISSN 2798-8961, 2798–8961.*
- Indra Hermawan. (2021). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di desa purworejo kecamatan kota gajah kabupaten lampung tengah. 2(2), 153–159.*
- Juniarti. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(3), 608–620.*
- Lestari. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa , Sistem Pengendalian Internal dan Transparansi Informasi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi) Volume 9 (5) Oktober Tahun 2023, Hal 1745-1752., 9(5), 1745–1752.*
- Maina. (2022). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambi Boyolali Sitasi Artikel : *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis 2022; 1(2): 51-59 Https://Jurnal.Jiemap.Net/Index.Php/Jikab, 1(2962-2433Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis), 51–59. https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8*
- Megaayu. (2023). Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas, Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kebonagung Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 12, 554–563. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra,*
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B, 72(10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf*
- Nasrizal. (2024). *Pengaruh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan kompetensi aparatur desa terhadap pengelolaan dana desa pada desa di kabupaten karimun. 5(1).*
- Ni Putu. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa, Efektivitas Kinerja Pendampingan Lokal Desa dan Keterlibatan Masyarakat Terhadap Pengoptimalan Pengelolaan Dan Desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganessa, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 e- ISSN: 2614 – 1930., 11(2614–1930), 178–190.*
- Nislandi. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 12(2), 143–150.*

- <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Novia Rosy. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk. *E-Jra Vol. 11 No. 05, 11(09)*, 84–92.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun. (2025). *Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa*.
- Permendagri No. 2. (2025). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah Tahun 2025*. 1–33.
- Permendagri Nomor. 15. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. 1–23.
- PMK Nomor 108. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024, Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun Anggaran 2025*. 1–800.
- Puspitasari. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 1(1)*, 121–134.
- Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(Special Issue 3)*, 1668–1688.
- Putri Zhafira. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Desa Pasir Lhok Aron Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS). Volume 2, 2(4)*, 509–517.
- Rahma Yulita. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur The Influence of Accountability , Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Village Financi. *Jurnal Kolaboratif Saians .Volume 6 ISSUE, 6(12)*, 1975–1982. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586>
- Ridha Fajri. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur, dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Al-Iqtishad Vol.17 No.2 Tahun 2021*.
- Riyanto. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Jurnal Respon Publik, 15(2)*, 29–39.
- Rizal. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 6(4)*, 1400–1415.
- Setyaningrum. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 3(3)*, 581–589. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.104>
- Shagita. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 6 No 3 (2024), 6(3)*, 3812–3825. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i>
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan, 67*, 18.
- Widiyarsari. (2023). Pengaruh Kemampuan Karyawan, Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di PT.Yupi Indo Jelly Gum Karanganyar. *JIMEA| Jurnal Ilmiah MEA(Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) Vol. 7 No.2, 2023, 7(2)*, 1245–1257.
- Widya Nengsih. (2019). Jmiap. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.2 No.1 Maret 2019, 2(1)*, 112–124.

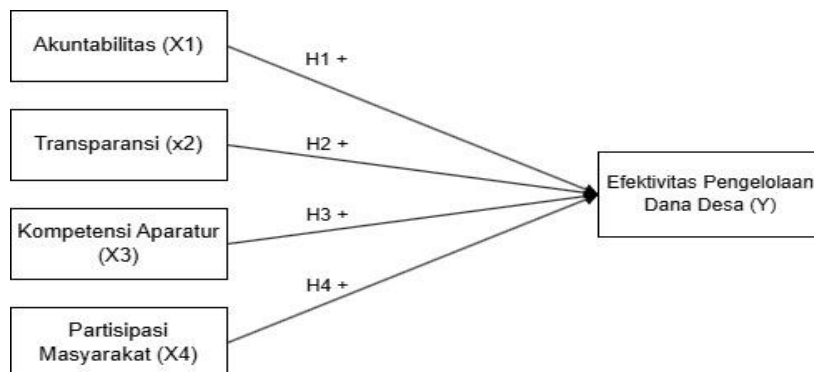
Wulandari. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa se-Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo). *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital Vol.3, No.1, 3*(EISSN 2962-9394), 19–30.

GAMBAR DAN TABEL

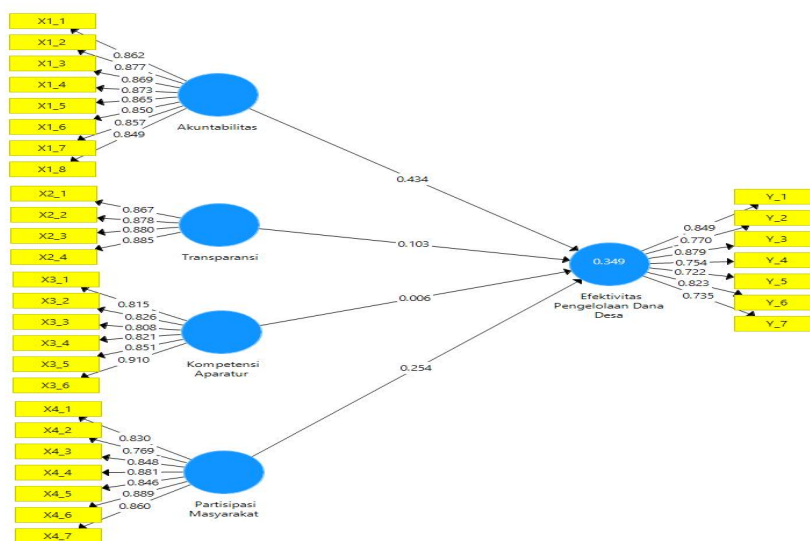
Tabel 1. Pengukuran Indikator

Variabel	Definisi	Indikator	Referensi
Akuntabilitas	Pertanggungjawaban dapat dipahami sebagai kewajiban individu atau suatu pihak yang diberi amanah oleh pemangku kepentingan untuk menjalankan tugasnya sehingga tujuan dan hasil yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. (Maina, 2022)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Anggaran Pemerintah Desa 2. Perumusan rencana kerja oleh pemerintah Desa 3. Pengajuan Anggaran 4. Pelaksanaan Belanja Desa 5. Jumlah Belanja 6. Evaluasi Kinerja 7. Laporan Keuangan 	(Rizal, 2024)
Transparansi	Keterbukaan informasi mengharuskan suatu organisasi untuk bersikap terbuka kepada publik dengan menyediakan informasi yang akurat, jelas, serta dapat diakses secara adil mengenai proses penyelenggaraan kegiatan. Keterbukaan ini tetap dilakukan dengan memperlihatkan perlindungan hak pribadi, kepentingan kelompok, serta kerahasiaan instansi. (Maina, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakannya musyawarah bersama masyarakat setempat. 2. Tersedianya penerimaan data yang jelas dan keterbukaan terkait peraturan serta pelaksanaan kegiatan. 	(Novia Rosy, 2022)
Kompetensi Aparatur	Kompetensi mencakup perpaduan antara ilmu, pemahaman, penguasaan, perilaku kerja serta keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pengelolaan Dana Desa secara efektif. Selain itu, kapasitas dapat dipahami sebagai kualitas individu dalam melaksanakan tugas sesuai standar telah ditetapkan (Enggar, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Keahlian 4. Sikap 	(Budiarti, 2021)
Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat merupakan langkah dimana individu dan kelompok dalam terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan yang dapat memengaruhi hidup mereka. (Maina, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan dalam penyusunan 2. Keikutsertaan dalam penyusunan 3. Proses perencanaan serta implementasi 4. Keterlibatan Masyarakat dalam proses evaluasi. 	(Budiarti, 2021)
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Ukuran pencapaian tata kelola pendanaan desa menunjukkan sejauh mana pemerintah desa mampu mencapai tujuan pemanfaatan dana yang bersumber dari APBN. Suatu pengelolaan dapat dinilai berhasil apabila sasaran yang telah dirumuskan dapat diwujudkan secara optimal (Agnes Mojo, 2023).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan Desa 2. Waktu Kegiatan 3. Manfaat Kegiatan 4. Pengelolaan Dana Desa 	(Rizal, 2024)

Sumber: Penelitian terdahulu



Gambar 2. Kerangka Konseptual
Sumber: Aplikasi draw.io Diagram



Gambar 3. Path Model
Sumber: Data Diolah tahun 2025

Tabel 1. Dana Desa

No	Nama Desa	Dana desa 2025
1	Kasilib	Rp 800.385.000,00
2	Tapen	Rp 774.033.000,00
3	Karangjambe	Rp 817.080.000,00
4	Wanadadi	Rp 842.348.000,00
5	Wanakarsa	Rp 909.428.000,00
6	Lemahjaya	Rp 1.279.954.000,00
7	Karangkemiri	Rp 939.233.000,00
8	Kandangwangi	Rp 988.388.000,00

Sumber: Kantor Kec.Wanadadi

Tabel 2. Biodata Responden

Karakteristik Responden	n	%
Umur (tahun)		
21-30	5	5,95%
31-39	19	22,62%
>40	60	71,43%
Jenis Kelamin		
Pria	54	64,29%
Wanita	30	35,71%
Pendidikan		
SMA	45	53,57%
D3	9	10,71%
S1	24	28,57%
S2	1	1,19%
Lainnya	5	5,95%
Jabatan		
Kades	8	9,52%
Sekdes	8	9,52%
Kaur Keuangan	8	9,52%

Lainnya 60 71,43%

Sumber; Data Diolah Ms Excel tahun,2025

Tabel 3. Hasil Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	Valid
Akuntabilitas (X1)	X1_1	0.862	Valid
	X1_2	0.877	Valid
	X1_3	0.869	Valid
	X1_4	0.873	Valid
	X1_5	0.865	Valid
	X1_6	0.850	Valid
	X1_7	0.857	Valid
	X1_8	0.849	Valid
Transparansi (X2)	X2_1	0.867	Valid
	X2_2	0.878	Valid
	X2_3	0.880	Valid
	X2_4	0.885	Valid
Kompetensi Aparatur (X3)	X3_1	0.815	Valid
	X3_2	0.826	Valid
	X3_3	0.808	Valid
	X3_4	0.821	Valid
	X3_5	0.851	Valid
	X3_6	0.910	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	X4_1	0.830	Valid
	X4_2	0.769	Valid
	X4_3	0.848	Valid
	X4_4	0.881	Valid
	X4_5	0.846	Valid
	X4_6	0.889	Valid
	X4_7	0.860	Valid
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y_1	0.849	Valid
	Y_2	0.770	Valid
	Y_3	0.879	Valid
	Y_4	0.754	Valid
	Y_5	0.722	Valid
	Y_6	0.823	Valid
	Y_7	0.735	Valid

Sumber: Data Primer Diolah tahun,2025

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	84	35.63	29	40	3.673
Transparansi (X2)	84	18.05	16	20	1.735
Kompetensi Aparatur Desa (X3)	84	26.68	22	30	2.662
Partisipasi Masyarakat (X4)	84	30.65	24	35	3.374
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	84	31.18	28	35	2.764

Sumber: Data Primer Diolah tahun, 2025

Tabel 5. Hasil Uji Composite Reliability

Indikator	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Akuntabilitas (X1)	0.951	0.959	0.744
Transparansi (X2)	0.904	0.931	0.770
Kompetensi Aparatur (X3)	0.917	0.934	0.704

Partisipasi Masyarakat (X4)	0.934	0.947	0.717
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.901	0.922	0.628

Sumber: Data Primer Diolah tahun, 2025

Tabel 6. Uji *Coefficient of Determination*(R²)

Indikator	R-Square	R-Square Adjusted
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.349	0.316

Tabel 7. Uji *Predictive Relevance* (Q²)

Sumber: Data Primer Diolah tahun, 2025

Konstruk	Q-Square
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.198

Sumber: Data Primer Diolah tahun, 2025

Tabel 8. Uji Hipotesis

Indikator	Original Sampel (O)	T Statistik	P Value	Keterangan
X1-> Y	0.434	4.671 > 1,664	0.000 < 0.05	Berpengaruh
X2-< Y	0.103	0.908 < 1,664	0.139 > 0.05	Tidak Berpengaruh
X3-< Y	0.006	0.066 < 1,664	0.474 > 0.05	Tidak Berpengaruh
X4-> Y	0.254	2.727 > 1,664	0.006 < 0.05	Berpengaruh

Sumber: Data Primer Diolah tahun, 2025